

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Hakim Sholahuddin. 2023. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka. Banten.
- Affan Gaffar. 2010. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Fajlurrahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Hikmahanto Juwana. 2020. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum. Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Maruarar Siahaan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta.
- Mohd. Yasin. Kedudukan DKPP Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 7. No. 1.
- Munir Fuady. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Nurul Qamar. 2013. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Ramlan Surbakti. 2008. *Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Kemitraan. Jakarta.
- . 2015. *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Kemitraan. Jakarta.
- Robi Cahyadi Kurniawan. 2021. *Etika Politik dan Pemerintahan*. Pustaka Media. Bandar Lampung.
- Rumidan Rabi'ah. 2009. *Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Samuel P. Huntington. 1997. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. PT. Midas Surya Grafindo. Jakarta.

- Satya Arinanto. "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu". *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 16. No. 2. 2021.
- Sulardi. 2012. *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*. Setara Press. Malang.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2012. *Negara. Demokrasi. dan Civil Society*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Teuku May Rudy. 1999. *Politik Demi Tuhan; Nasionalisme Religius di Indonesia*. Pustaka Hikmah. Bandung.
- T. Indratno. H. B. 2008. *Ayo Belajar Pendidikan Kewarganegaraan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Zakaria Bangun. 2008. *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*. Bina Media Perintis. Medan.

JURNAL DAN ARTIKEL ILMIAH

- Abdul Masri Purba. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas", *Jurnal Publik Reform Undhar Medan*. Volume 8. Nomor 1.
- Achmadudin Rajab. 2021. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengaktifkan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum. *Jurnal USM Law Review*. Volume 4. Nomor 1.
- Agus Iptian Dasopang. 2021. Kajian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Atas Sanksi Pemberhentian Anggota Penyelenggara Pemilu (Analisis Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum JIMHUM*. Volume. 1. Nomor. 3.
- Aji Pangestu. 2022. Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*. Volume 4. Nomor 1.
- Arif Maulana, et.al. 2024. Peran Bawaslu Dalam Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Melalui Media Sosial: Analisis Yuridis Normatif di Kabupaten Pinrang. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Volume 4. Nomor 1.
- Fauziah Suci Angraini. 2021. Pro Kontra Penegakan Etik Secara Internal dan Eksternal. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*. Volume 1. Nomor 1.

- Febry James Langkun, et.al. 2023. Analisis Juridis Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Sulawesi Utara. *Jurnal Tana Mana*. Volume 4. Nomor 1.
- Haedar Djidar, 2024. Pendidikan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Adhoc Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Jurnal Andi Djemma Jurnal Pendidikan*. Volume 7. Nomor 2.
- Jatmiko Hary Sulistiyo, et.al. 2025. Legal Certainty of the Decision of the Election Organizer Honorary Council on the General Election Commission in the Implementation of the 2024 Election: A Review from the Legislation Perspective. *Jurnal SiRad: Pelita Wawasan*. Volume 1. Nomor 1.
- Marsela Marissaha Adil. 2021. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia. *Lex Administratum*. Volume 8. Nomor 1.
- Nathasia Teffany Putri. 2025. Penegakan Kode Etik Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah 2024 dan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Oleh KPU Kota Surakarta. *Jurnal Bevinding*. Volume 03. Nomor 1.
- Okvita Sekar Fadhillah. 2024. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Mengatasi dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum dan Praktik. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*. Volume 06. Nomor 1.
- Roni Aprilianto. 2024. Proses Rekrutmen Kepanitiaan Pemilu Tingkat Kecamatan dan Desa Studi pada Prbolematika Pemilu di Kabupaten Jember. *Pubmedia Social Sciences and Humanities* Volume 1. Nomor 4.
- Satya Arinanto. 2021. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Hukum Progresif*. Volume 16. Nomor 2.
- Viantrus Maupiku, et.al. 2022. Penegakan Sanksi Hukum Kepada Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Yang Mempengaruhi Pemilih. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1. Nomor 11.
- Yunika Isnaeni et.al. 2025. Pelanggaran Kode Etik: Studi Kasus Pemberhentian Ummi Wahyuni Sebagai Ketua Kpu Jawa Barat Oleh DKPP RI. *Jurnal Multidisiplin Sosisal Humaniora*. Volume 2. Nomor 1.

PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Cara Badan Ahoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-KPT/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.